

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu penyebab timbulnya kesenjangan perkembangan wilayah adalah karena terjadinya pemusatan kegiatan dan fasilitas-fasilitas sosial ekonomi pada daerah perkotaan. Selain itu, penyebab timbulnya kesenjangan adalah tidak adanya sarana penghubung yang berupa pusat-pusat pelayanan di kota-kota kecil atau kota pedesaan yang berfungsi sebagai kolektor dan distributor hasil pembangunan dari daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Walaupun pusat pelayanan pedesaan sudah terbentuk, namun karena lokasinya yang tidak tepat dapat berakibat kurang berfungsinya pusat pelayanan tersebut. Sehingga tidak akan terjadi hubungan keterkaitan antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan dan pembangunan sosial ekonomi tidak akan berjalan dengan lancar.

Fenomena kesenjangan perkembangan wilayah tersebut juga terjadi di Kabupaten Kendal dan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Kendal cenderung tidak merata dan hanya terkonsentrasi pada beberapa daerah saja, terutama pada wilayah bagian utara yang mempunyai berbagai kelengkapan dalam fasilitas-fasilitas sosial ekonominya. Sedangkan pada wilayah bagian selatan mempunyai topografi yang bergelombang dan berbukit-bukit yang pada kenyataannya mempunyai tingkat aksesibilitas yang rendah terhadap wilayah sekitarnya. Sehingga kesenjangan antar wilayah ini dapat dilihat dari perbedaan perkembangan wilayah bagian utara dengan wilayah bagian selatan.

Terkonsentrasinya fasilitas-fasilitas pelayanan di pusat-pusat kota, peningkatan jumlah penduduk, kesenjangan tingkat pendapatan dan kesejahteraan, menuntut perhatian terhadap masalah yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan sosial ekonomi untuk menghindari semakin padatnya arus penduduk ke pusat-pusat pelayanan karena pada gilirannya daerah pusat akan

semakin dipadati penduduk yang menuntut lebih banyak lagi fasilitas pelayanan sehingga kesenjangan akan lebih besar (Sutanto dalam Astuti, 2000). Oleh sebab itu, perencanaan pusat pelayanan diperlukan dalam mengatasi berbagai kesenjangan yang ada. Untuk merencanakan suatu pusat pelayanan perlu mengetahui persebaran fasilitas pelayanan sosial ekonomi pada wilayah tersebut, apakah perkembangan fasilitas pelayanan sosial ekonomi mengumpul pada beberapa daerah saja atau tersebar merata pada seluruh wilayah. Sehingga perlu diadakan penelitian untuk mengetahui pada wilayah mana pusat pelayanan harus diletakkan dan dapat berfungsi secara optimal. Dengan diketahuinya letak pusat pelayanan yang representatif tersebut, diharapkan dapat membantu kelancaran pembangunan sehingga kesenjangan pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan dapat teratasi. Di samping itu, perencanaan pusat pelayanan dapat mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang dapat berperan dalam perkembangan wilayahnya.

Perkembangan suatu wilayah terkait erat dengan potensinya dan optimalisasi pemanfaatan potensi tersebut. Dengan demikian, lazim dijumpai perbedaan potensi dan optimalisasi pemanfaatannya melahirkan perbedaan wilayah dalam berbagai tingkatan baik pada tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dalam suatu proses pembangunan perlu dilakukan identifikasi mengenai potensi-potensi yang ada di wilayah pembangunan. Terutama identifikasi mengenai sektor-sektor ekonomi basis yang dapat memacu perkembangan wilayahnya dan pada akhirnya nanti proses-proses pembangunan akan mempertimbangkan mengenai potensi-potensi yang sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Karena tanpa mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi yang ada, proses pembangunan tidak akan mengenai sasarannya.

Kajian mengenai penentuan pusat-pusat pelayanan penting karena dapat menciptakan keterkaitan antara wilayah perkotaan dengan pedesaan agar terjadi pembangunan yang merata dan dengan adanya prioritas pengembangan basis ekonomi wilayah, maka diharapkan akan terjadi perkembangan wilayah yang terpadu baik dari sudut pandang regional maupun sektoralnya.

1.2 Perumusan Masalah

Kabupaten Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 km² dan merupakan wilayah yang mempunyai fisiografi yang kompleks. Ini terlihat dari bagian selatan yang didominasi oleh daerah pegunungan dengan relief yang bergelombang dan curam, sedangkan bagian utara mempunyai wilayah yang sebagian besar dataran yang memanjang sampai ke pantai bagian utara Pulau Jawa. (BPS Kabupaten Kendal, 2001).

Dari perbedaan wilayah yang beragam tersebut maka Kabupaten Kendal mempunyai tantangan di dalam mengembangkan daerahnya dan sekaligus berupaya untuk mengatasi permasalahan kesenjangan yang ada. Pemerataan pembangunan bagi setiap daerah adalah suatu usaha yang diharapkan guna mencapai suatu masyarakat yang sejahtera serta peningkatan pembangunan dalam lingkup nasional.

Namun pada kenyataannya masih terjadi kesenjangan antar wilayah, antar kecamatan dan antar kota desa yang dapat dilihat antara lain dari kesenjangan perkembangan pendapatan per kapita; distribusi penduduk antar wilayah desa dan kota; kualitas dan kuantitas SDA dan jumlah desa tertinggal. (BAPPEDA Kabupaten Kendal, 2001).

Berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasi di daerah penelitian diantaranya adalah :

1. Terjadi perkembangan wilayah yang tidak merata di Kabupaten Kendal, sehingga masih banyak daerah-daerah yang mengalami keterbelakangan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan tingkat perkembangan antara wilayah bagian utara dengan wilayah bagian selatan. Dari 285 desa di Kabupaten Kendal, 56 wilayah desa dikelompokkan sebagai desa tertinggal yang cenderung berada di wilayah bagian selatan (BPS Kabupaten Kendal, 1998).
2. Distribusi fasilitas sosial ekonomi yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Kota Kendal sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan sosial ekonomi. Infrastruktur yang belum memadai dan tidak terjangkau di daerah

hinterlandnya berakibat pada terhambatnya aksesibilitas daerah-daerah pada pusat-pusat pelayanannya.

3. Terjadinya persebaran penduduk yang terkonsentrasi di wilayah bagian utara yaitu sekitar 66,16 % dari jumlah penduduk di Kabupaten Kendal. Tidak meratanya sebaran penduduk disamping dipengaruhi oleh faktor ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi, juga dipengaruhi oleh faktor topografi. Wilayah di bagian selatan umumnya mempunyai topografi yang berbukit dan bergelombang, sedangkan di wilayah utara cenderung mempunyai topografi yang relatif datar (BPS Kabupaten Kendal, 1998).
4. Suatu wilayah akan selalu mengalami perkembangan terutama yang disebabkan oleh dinamika kependudukan termasuk perubahan sistem hirarki permukiman, sehingga perlu meninjau lagi struktur ruang wilayah dengan mengidentifikasi kembali hirarki permukiman.

Proses-proses pembangunan wilayah yang terjadi yang terkait dengan struktur ruang wilayah dapat memberikan gambaran keadaan wilayah tersebut dalam mengatasi segala ketimpangan perkembangan wilayah. Pada umumnya akan terjadi suatu perkembangan yang tidak merata dan terjadi proses perkembangan yang hanya terjadi pada wilayah-wilayah tertentu. Oleh sebab itu perlu adanya suatu pendekatan penentuan pusat pelayanan pedesaan yang akan mampu menjalarkannya ke daerah belakangnya dengan adanya mekanisme timbal balik pada daerah-daerah tersebut.

Apabila dikaitkan dengan kondisi wilayah Kabupaten Kendal, pengembangan melalui pendekatan pusat pelayanan pedesaan diharapkan mampu menyeimbangkan perbedaan kemampuan potensi tiap daerah. Di samping itu adanya pusat-pusat pelayanan baru tersebut pada akhirnya diharapkan mampu mendorong perkembangan wilayah Kabupaten Kendal ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka penelitian ini mengambil judul **Penentuan Pusat-Pusat Pelayanan dan Prioritas Pengembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Kendal.**

Selanjutnya pertanyaan penelitian yang muncul adalah :

1. Bagaimana hirarki pelayanan sosial ekonomi di Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana potensi-potensi sektoral di Kabupaten Kendal?
3. Bagaimana rekomendasi terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Kendal ?

1.3 Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui hirarki pelayanan sosial ekonomi sebagai dasar penentuan pusat-pusat pelayanan.
2. Mengetahui potensi-potensi sektoral yang dapat dikembangkan di daerah penelitian.
3. Membuat rekomendasi pengembangan wilayah berdasarkan pusat pelayanan dan potensi sektoral.

1.4 Kegunaan Penelitian :

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai bahan penyusunan skripsi guna memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian akhir tingkat sarjana (S1) Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada;
2. Sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan wilayah, terutama yang berkaitan dengan pengembangan fasilitas pelayanan sosial ekonomi dan sektoral;
3. Sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian selanjutnya;
4. Sebagai sumber informasi bagi Pemda Kabupaten Kendal dalam melakukan perencanaan pengembangan.

1.5 Telaah Pustaka

1.5.1 Studi Geografi

Menurut Bintarto (1988), Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Obyek kajian geografi yaitu obyek material dan obyek formal. Obyek material berkaitan erat dengan beberapa aspek kehidupan manusia, lingkungan dan aspek pembangunan, sedangkan obyek formal adalah cara memandang dan cara berfikir terhadap obyek material tersebut dari segi keruangan yang meliputi pola, sistem dan proses.

Menurut Heslinga (dalam Bintarto, 1988) ada tiga hal yang pokok dalam mempelajari obyek formal dari sudut pandang keruangan, yaitu : (1) Pola dari sebaran gejala tertentu di muka bumi (*spatial pattern*), (2) Keterkaitan atau hubungan sesama antar gejala tersebut (*spatial system*), (3) Perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala tersebut (*spatial process*).

Dalam studi geografi (terutama yang berkaitan dengan pembangunan suatu wilayah), analisis keruangan merupakan suatu metode yang banyak dipergunakan, karena pendekatan keruangan tersebut banyak berhubungan dengan unsur-unsur di bawah ini (Bintarto, 1988).

1. Jarak, baik jarak absolut maupun jarak relatif atau jarak sosial.
2. Situs dan situasi, yang di dalamnya banyak berhubungan dengan fungsi suatu wilayah.
3. Aksesibilitas, yang erat kaitannya dengan topografi dan teknologi yang dimiliki suatu wilayah tertentu termasuk penduduk yang bermukim di dalamnya. Suatu daerah yang memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemajuan yang relatif baik dibandingkan dengan daerah yang beraksesibilitas yang rendah.
4. Keterkaitan atau koneksitas, yang besar kecilnya banyak menentukan hubungan fungsional antara beberapa tempat.
5. Pola atau pattern, yaitu pengulangan fenomena tertentu dalam lingkup geosfer.

Jika dilihat dari unsur-unsur geografi di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan yaitu mengkaji wilayah dalam satuan administrasi dengan membuat hirarki permukiman secara fungsional dan dianalisis sebagai dasar penentuan pusat-pusat pelayanan pedesaan dan prioritas pengembangan ekonomi wilayah. Secara garis besar tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membuat hirarki permukiman untuk penentuan pusat-pusat pelayanan pedesaan, dan penentuan prioritas pengembangan ekonomi wilayah. Dari tahapan-tahapan tersebut mempunyai landasan teoritis yang masing-masing akan dijabarkan di bawah ini.

1.5.2 Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi

Perencanaan pusat pelayanan pedesaan pada dasarnya tidak hanya berperan sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi pedesaan dengan kegiatan berskala nasional (bahkan internasional), tetapi juga sebagai katalisator pembangunan sosial ekonomi wilayah pedesaan. Perencanaan pusat pelayanan pedesaan ini didasari pada konsep pemikiran yang menyatakan bahwa keterkaitan dan keterpaduan pusat-pusat pelayanan menurut hirarki dan fungsi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan yang lebih merata (Rondinelli, 1985).

Dengan sistem hirarki pusat pelayanan yang padu akan mempermudah penduduk di seluruh wilayah (baik perkotaan maupun pedesaan) untuk memperoleh berbagai tingkatan pelayanan sosial ekonomi, sehingga integrasi desa-kota akan lebih mudah terwujud. Menurut Rondinelli dan Ruddle, faedah yang didapat dari pusat pelayanan yang padu adalah sebagai berikut (Rondinelli, 1985):

- Dapat menciptakan “*economies of scale*” dan “*spread effect*” yang menguntungkan baik bagi penduduk di pusat itu sendiri maupun penduduk di wilayah sekitar pusat tersebut;
- Dapat berfungsi sebagai organisator kegiatan ekonomi daerah belakangnya baik melalui sistem pasar, administrasi, maupun sistem

memenuhi berbagai bentuk pelayanan, sehingga akan dapat menciptakan diversifikasi kesempatan kerja;

- Dapat menciptakan suasana kreatif dan inovatif melalui pertukaran pola-pola sikap dan perilaku;
- Dapat menciptakan keuntungan komparatif antar wilayah dan iklim penanaman modal kembali yang sehat, sehingga kesempatan untuk dapat berkembang menjadi lebih terbuka;
- Dapat menciptakan kebutuhan akan pelayanan-pelayanan, sarana dan prasarana baru, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat terjamin;
- Dapat menciptakan hubungan fisik dan ekonomi diantara permukiman dan sekitarnya serta daerah belakangnya dengan meningkatkan aksesibilitas dari tempat pusat;
- Menciptakan hubungan aktivitas sosial dan ekonomi dengan menciptakan pasar yang baru untuk bahan mentah, barang setengah jadi dan komoditas baru.

Pusat pelayanan pedesaan memiliki berbagai fungsi. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan pelayanan sosial dan ekonomi kepada penduduk pedesaan, dengan cara yang paling ekonomis. Karena itu, perencanaan pusat pelayanan harus merupakan bagian dari rencana pembangunan pedesaan terpadu. Dengan cara demikian, akan tampak jelas jenis pelayanan apa saja yang diperlukan. Penyediaan pelayanan ini akan disesuaikan dengan dana yang ada dari pemerintah. Dalam ruang, pusat-pusat pelayanan ini muncul sebagai permukiman dari berbagai ukuran, dengan pelayanan dari berbagai jenis dan jumlah. Jenis dan jumlah pelayanan dalam suatu pusat bergantung dari ukuran serta jumlah penduduk dalam pusat tersebut, serta penduduk di daerah sekitarnya yang ikut terlayani. Pusat-pusat pelayanan dari berbagai ukuran ini menunjukkan adanya suatu tingkatan atau hirarki. (Widyatmoko, 1989).

Pembahasan hirarki pusat pelayanan umumnya selalu berpijak pada teori dasar center place theory menurut Christaller dan Losch serta para pendukungnya.

Ada dua konsep dasar yang mendasari teori pusat pelayanan, yaitu (Widyatmoko, 1989) :

1. Jarak jangkauan barang (*the range of goods*), yaitu jarak tempuh yang masih dapat ditolerir untuk suatu jenis barang atau pelayanan tertentu. Di samping unsur jarak, penentuan pilihan oleh pengguna juga dipengaruhi oleh jenis, kualitas, dan harga barang atau pelayanan yang ditawarkan.
2. Nilai ambang (*threshold value*), yaitu jumlah penduduk atau sumberdaya minimum yang dibutuhkan untuk dapat mendukung penyediaan barang atau pelayanan tertentu. Sebagai contoh, praktek seorang dokter akan memerlukan jumlah pasien tertentu untuk mendukung kelangsungan praktek tersebut (dalam hal ini berkaitan dengan pendapatan dokter tersebut). Apabila persyaratan minimum ini tidak terpenuhi, maka ia akan memutuskan untuk pindah ke daerah lain.

Kedua konsep di atas sangat menentukan sifat hirarki permukiman. Beberapa permukiman mungkin lebih berperan sebagai pusat dibandingkan dengan permukiman-permukiman yang lain. Sifat ini berkaitan dengan jumlah penduduk yang dilayani, dan ketersediaan sumberdaya yang mendukungnya. Penduduk yang dilayani tidak harus berasal dari pusat itu sendiri, tetapi juga penduduk dari daerah sekitarnya (*hinterland*), atau dengan kata lain penduduk di daerah mintakat pengaruh (*zone of influence*) pusat tersebut. Seperti telah di sebutkan sebelumnya, pusat/permukiman pada tingkat yang lebih rendah hanya menyediakan pelayanan dan barang yang lebih terbatas jumlah maupun jenisnya (pelayanan dasar). Jadi pusat-pusat ini harus berada dalam jarak tempuh kurang dari satu hari perjalanan. Pusat-pusat pelayanan pada tingkat yang lebih tinggi akan menyediakan barang dan pelayanan yang memerlukan nilai ambang yang lebih tinggi, di samping pelayanan dasar. Jumlah penduduk dan sumberdaya dalam mintakat pengaruhnya pun akan lebih besar. Berdasarkan pemikiran di atas, dapat diidentifikasi pusat-pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat lokal, pusat regional, maupun pusat nasional (bahkan pusat internasional). Tingkatan suatu pusat dalam hirarki akan mencerminkan tingkat kepusatan

(*centrality*) dari pusat tersebut, dibandingkan pusat-pusat yang lain dalam wilayah analisis tertentu. (Widyatmoko, 1989).

Ada tiga metode yang bisa dipakai oleh para demograf, geograf, dan para perencana untuk menganalisa hirarki sistem permukiman. Ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut (Rondinelli, 1985) :

1. Klasifikasi morfologi, yang membedakan masyarakat perkotaan dan pedesaan berdasarkan karakteristik demografi dan ciri-ciri fisik.
2. Klasifikasi ukuran besarnya penduduk, yang membuat kategori area permukiman ke dalam wilayah metropolitan, kota besar, kota sedang, kota kecil, dan desa berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang membatasinya.
3. Klasifikasi fungsional, yang membuat klasifikasi area permukiman berdasar atas macam, kombinasi, dan keragaman aktivitas-aktivitas sosial ekonomi yang beralokasi di situ.

Dalam penelitian ini menggunakan klasifikasi fungsional dengan cara membuat klasifikasi area permukiman berdasarkan atas macam, kombinasi, dan keragaman aktivitas-aktivitas sosial ekonomi yang ada di daerah penelitian untuk membuat hirarki permukiman yang akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan pusat-pusat pelayanan pedesaan.

Dalam meningkatkan perkembangan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi, prasarana (infrastruktur) merupakan hal yang penting. Pembangunan tidak dapat berjalan lancar apabila prasarana tidak baik. Jadi prasarana dapat dianggap sebagai faktor potensial dalam menentukan masa depan dari perkembangan suatu wilayah perkotaan dan pedesaan. Sedangkan tujuan kebijaksanaan sosial-ekonomi dalam pengembangan wilayah dapat menurunkan pengangguran, menaikkan pendapatan, dan memperbaiki pelayanan dalam wilayah (Jayadinata, 1992).

Mengenai bentuk, macam, dan fungsi prasarana, dijelaskan oleh Jayadinata (1992) sebagai berikut :

1. Bentuk prasarana : (a). yang berbentuk ruang dan bangunan (*space*), (b) yang berbentuk jaringan (*network*)
2. Macam prasarana: (a). berbentuk ruang/bangunan yaitu : perlindungan (rumah), fasilitas pelayanan umum (rumah sakit, bank, dsb), dan kebudayaan (bioskop, perpustakaan, dsb),
(b). berbentuk jaringan yaitu:
 - Sistem perangkutan, misalnya jaringan jalan
 - Utilitas umum, misalnya jaringan listrik
 - Sistem komunikasi, misalnya jaringan telepon
 - Sistem pelayanan kehidupan sosial ekonomi, misalnya irigasi dan pengairan.
3. Prasarana menurut fungsinya dikelompokkan menjadi :
 - Prasarana sosial yang terdapat dalam kegiatan, diantaranya : kekeluargaan, pemerintahan, agama, kesehatan, pendidikan, rekreasi, keamanan, komunikasi, dsb.
 - Prasarana ekonomi yang terdapat dalam kegiatan, diantaranya : pertanian, industri, pariwisata, perdagangan, perhubungan dan komunikasi, dsb.

Mallick dan Routray (2001) dalam penelitiannya di India, diantaranya bertujuan untuk menganalisa suatu permukiman melalui identifikasi distribusi fungsi dan pusat pelayanan sosial ekonomi. Untuk tujuan ini, dilakukan identifikasi permukiman yang dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan berdasarkan pada besarnya nilai indeks komposit dari fasilitas pelayanan. Besarnya nilai indeks komposit ini tergantung pada ketersediaan fasilitas pelayanan dan *population threshold*-nya. *Population threshold* yang dimaksud disini adalah jumlah penduduk pada setiap wilayah yang mempunyai fungsi dari suatu fasilitas pelayanan. Metode ini cenderung mengabaikan jumlah penduduk yang dibutuhkan untuk menunjang sebuah fungsi dengan hanya memakai ukuran jumlah penduduk dari wilayah yang mempunyai fungsi pelayanan dari pada daya layannya.

Lagi pula *threshold* sekarang ini tidak realistis menggambarkan potensi untuk permukiman dari ukuran yang berbeda-beda untuk menunjang pelayanan dan fasilitas dalam suatu perkembangan sistem permukiman yang tidak dan kurang terintegrasi. Tentu saja hal tersebut dapat menggambarkan kebijakan lokasi berdasarkan pada kriteria yang lain dari pada efisiensi ekonomi (Rondinelli,1985). Walaupun demikian metode ini dilakukan untuk memberikan cara yang cepat untuk mendapatkan penilaian kasar dari ukuran *population threshold* untuk fasilitas dan pelayanan yang ada sekarang dan dapat menyediakan informasi yang berguna jika digabungkan dengan analisis yang lain.

Roy dan Patil (dalam Huisman,1987) dalam penelitiannya di India, bertujuan menentukan/mengidentifikasi pusat-pusat pelayanan yang dapat menjamin distribusi barang-barang kebutuhan pokok serta pelayanan secara merata dan efisien. Untuk tujuan ini, dilakukan identifikasi permukiman yang dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan, serta menentukan berbagai tingkatan/hirarki permukiman beserta daerah layanannya. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi hirarki pusat pelayanan antara lain :

1. Metode Skalogram

- Didasarkan pada indikator jumlah dan jenis infrastruktur pelayanan, membuat tata urutan nama permukiman atas dasar jumlah penduduk danfasilitasnya.
- Tata urutan fasilitas juga berdasar jumlah dan jenisnya pada setiap permukiman.

2. Metode Sosiogram

- Untuk memperlihatkan interaksi dan interdependensi grafis dari gerakan masyarakat antar kelompok permukiman untuk memilih atau memanfaatkan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan.

3. Metode Bisektor

- Menggunakan peta lokasi sebagai dasar pendeleniasian mintakat pengaruh untuk pusat pelayanan tingkatan tertinggi, menengah dan rendah.

- Prinsip kerja metode ini sama dengan metode *polygon theissen*, yaitu mencari batas pengaruh terjauh dari suatu titik dengan menarik garis tegak lurus pada titik tengah garis penghubung titik-titik. Untuk menarik batas yang rasional dan representatif, digunakan tiga faktor pertimbangan utama yaitu administratif, pola jaringan dan topografi.

Dalam penelitian ini maka pusat-pusat pelayanan pedesaan ditentukan berdasarkan analisa hirarki sistem permukiman secara fungsional dengan melihat nilai indeks komposit yang dihasilkan dari fasilitas pelayanan. Dengan adanya penentuan pusat-pusat pelayanan pedesaan, maka diharapkan akan terjadi suatu proses penjalaran pertumbuhan dan perkembangan sampai ke daerah *hinterlandnya*.

1.5.3 Pengembangan Ekonomi Wilayah

Kurang terintegrasinya pembangunan wilayah yang maju dengan daerah kurang maju dapat menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan daerah kurang maju. Sebab wilayah yang lebih maju tidak dapat merangsang komersialisasi pertanian di wilayah kurang maju. Struktur pasar dan distribusi sarana dan prasarana yang terjadi antara wilayah maju dan kurang maju menjadi wilayah tersebut sulit untuk memasarkan surplus produksi, mendapatkan input produksi, memodernisasi pola-pola pertanian, penyesuaian produk terhadap kebutuhan konsumen (pasar), dan untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas hidup (Rondinelli, 1985).

Dalam menentukan rencana pembangunan suatu wilayah diperlukan suatu pendekatan mengenai identifikasi berbagai potensi-potensi yang dimiliki agar dapat diketahui orientasi basis pengembangan masing-masing wilayah terutama untuk mengantisipasi jangka panjang dalam perencanaan pengembangan wilayah. Untuk mengetahui orientasi basis pengembangan, digunakan model ekonomi regional yang dikembangkan oleh Richardson (1975) yaitu basis ekonomi atau *economic base*. Model ini merupakan salah satu peralatan analisis perekonomian

regional yang dapat menjelaskan struktur perekonomian daerah. Dalam model ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibedakan atas dua sektor di bawah ini :

1. Sektor basis, adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar di daerah sendiri maupun pasar di luar daerah tersebut. Ini berarti daerah tersebut mampu melakukan ekspor ke daerah lain.
2. Sektor non basis, adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang hanya mampu melayani pasar di daerah itu sendiri (*self sufficient*).

Teori ini selanjutnya menyatakan bahwa sektor basis menghasilkan barang dan jasa yang dijual keluar daerah maka ia akan menarik arus pendapatan ke daerah itu, dan secara berantai menaikkan konsumsi dan akhirnya menaikkan investasi yang berarti menciptakan kesempatan kerja baru. Kenaikan pendapatan di daerah itu selain menaikkan permintaan terhadap hasil sektor basis juga meningkatkan permintaan terhadap sektor non basis. Dengan dasar itu orang berpendapat bahwa sektor basis perlu dikembangkan di suatu daerah.

Bendavid (dalam Isnaeni, 1998) menyajikan model Tiebout tentang ekonomi basis dan data yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas perekonomian tersebut merupakan data pendapatan yang terbagi dalam sektor-sektor. Menurut model Tiebout, model basis ekonomi mengasumsikan bahwa kegiatan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kegiatan sektor basis atau sektor akan mempengaruhi kegiatan non basis.

Hoover (dalam Isnaeni, 1998) mengemukakan bahwa salah satu pendekatan untuk menjelaskan pertumbuhan daerah disebut dengan pendekatan ekonomi dasar. Ide terpenting dari teori menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dasar” di sini adalah cara pertumbuhannya yang dapat menimbulkan dan menentukan pembangunan daerah secara keseluruhan, sedangkan aktivitas-aktivitas lainnya yang bukan dasar hanya merupakan akibat dari seluruh pembangunan daerah. Untuk menggolongkan aktivitas ekonomi yang meliputi sektor ke dalam aktivitas basis dan non basis dapat digunakan pendekatan *Location Quotient Method*, yang pada dasarnya menggunakan teknik

perbandingan antara pola aktivitas di suatu daerah dengan seluruh daerah (Warpani, 1984).

1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

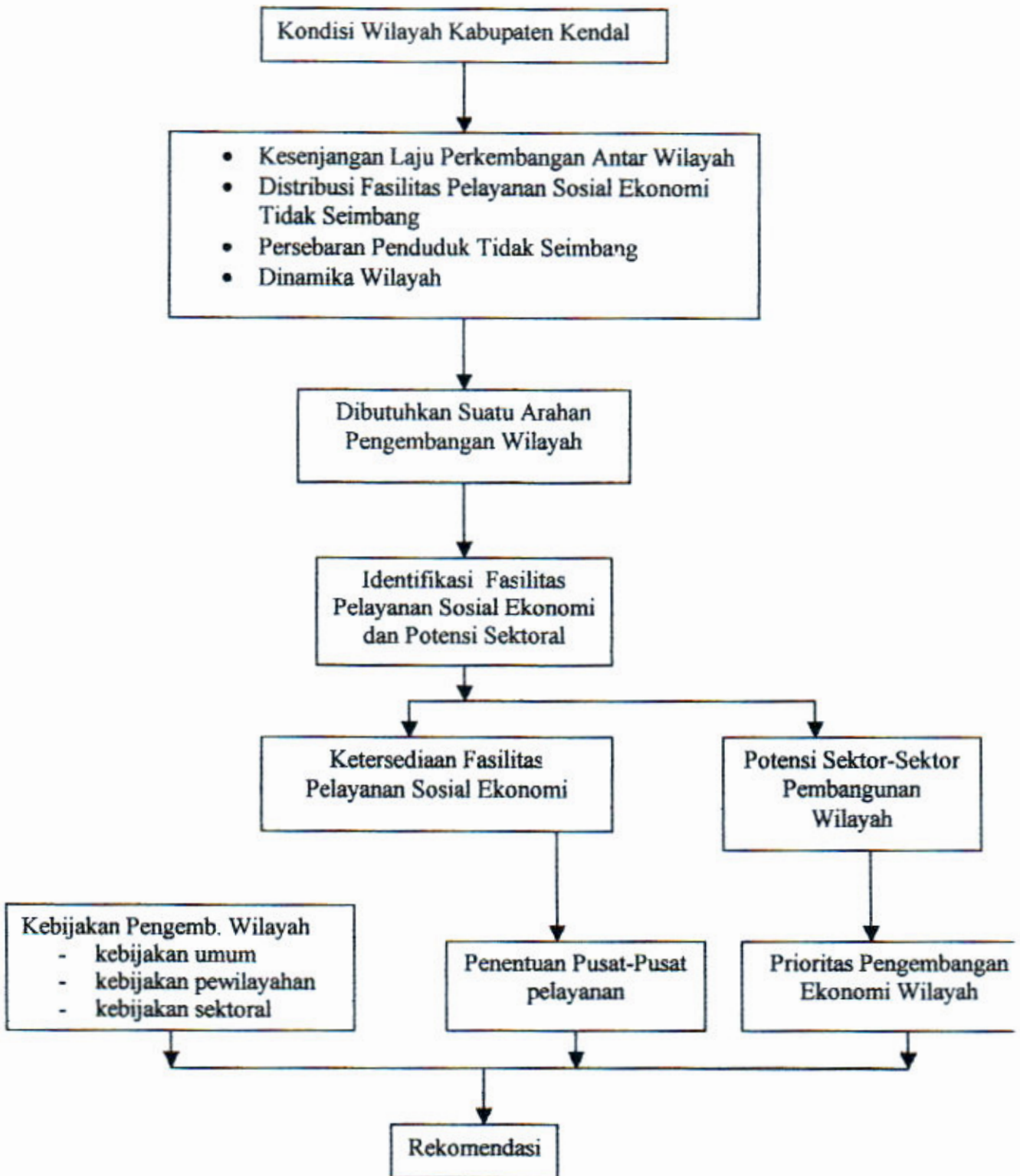
Proses pembangunan yang berjalan selalu diiringi oleh adanya suatu perubahan di dalam peningkatan kemajuan wilayah. Perubahan-perubahan wilayah tersebut dapat memunculkan suatu masalah kesenjangan wilayah apabila pada proses pembangunan tersebut tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di samping itu juga dapat terjadi karena wilayah-wilayah yang ada mempunyai perbedaan-perbedaan karakteristik di dalam perkembangannya. Kesenjangan wilayah terjadi karena kurang terintegrasinya antara wilayah yang maju dengan wilayah yang kurang maju. Sehingga perlu adanya suatu keterkaitan antara wilayah yang maju dengan yang kurang maju untuk saling berinteraksi.

Keterkaitan antar wilayah dapat dilihat dari sistem hirarki permukiman yang ada di wilayah tersebut melalui identifikasi fasilitas pelayanan sosial ekonominya. Dan sistem hirarki permukiman tersebut merupakan elemen penting yang dapat mempengaruhi penerapan strategi konsep pusat-pusat pelayanan. Permukiman dalam hal ini dianggap sebagai penyedia barang dan pelayanan bagi penduduk yang berada dalam jangkauan keruangan pusat-pusat pelayanan. Adanya hubungan antar permukiman di dalam sistem hirarki permukiman akan berpengaruh besar terhadap penjalaran pertumbuhan dari wilayah perkotaan ke pedesaan ataupun sebaliknya.

Potensi-potensi sektoral yang ada pada suatu wilayah dapat berperan sebagai penentu di dalam perkembangan wilayah tersebut. Keanekaragaman potensi sektoral yang dimiliki dapat menjadikan wilayah tersebut berkembang dengan cepat. Ditinjau dari perspektif keruangan, tentu saja sektor-sektor tersebut tidak menyebar secara merata di seluruh wilayah yang dapat disebabkan karena adanya perbedaan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah. Dengan demikian perencanaan pengembangan ekonomi wilayah berdasarkan pada basis ekonomi yang ada pada wilayah tersebut dengan berbagai sektor yang ada dengan



Diagram Alir Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 1.

tujuan untuk mengetahui sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan ciri-ciri dari masing-masing wilayah. Selain itu pengembangan sumberdaya alam di daerah dapat menunjang dan merangsang pengembangan wilayah dengan meningkatkan keterkaitan antar sektor dan daerah dari hasil komoditas bernilai tambah tinggi, sekaligus dapat meningkatkan perkembangan wilayah secara merata. Sehingga dalam proses pembangunan di wilayah penelitian dapat digunakan melalui pendekatan regional maupun sektoralnya. Pendekatan regional dilakukan dengan cara penentuan pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi dan pendekatan sektoral melalui prioritas pengembangan sektoral yang ada di wilayah penelitian sebagai rekomendasi pengembangan wilayah Kabupaten Kendal.

Dari uraian diatas maka dapat dilakukan suatu tahap-tahap penelitian sebagai berikut :

1. Melakukan deskripsi secara umum terhadap potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Kendal.
2. Membuat hirarki permukiman yang akan menggambarkan peringkat ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi.
3. Penentuan pusat-pusat pelayanan berdasarkan pada hirarki permukimannya.
4. Penentuan prioritas pengembangan ekonomi wilayah di Kabupaten Kendal.
5. Membuat rekomendasi pengembangan wilayah berdasarkan pusat-pusat pelayanan dan prioritas pengembangan ekonomi wilayah.

1.7 Hipotesis

1. Distribusi fasilitas pelayanan sosial lebih merata dibanding dengan fasilitas pelayanan ekonomi di Kabupaten Kendal.
2. Desa-desa yang mempunyai hirarki pelayanan sangat tinggi (hirarki 1) sebagian besar berada pada SWP 1 Kabupaten Kendal.
3. Sektor perindustrian merupakan sektor ekonomi yang penting dan menjadi andalan di daerah penelitian.